RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

2025 - 2029



Jl. Urip Sumoharjo No.13, Sambongpos, Sambong, Kec. Batang,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51212
Telp. / Fax : (0285) 4493081
Email : ptsp@batangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik dan selesai tepat waktu.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah PD, sasaran pelayanan jangka menengah PD, strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Selanjutnya RENSTRA yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahun yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP hingga Tahun 2029 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya RENSTRA ini, terutama kepada seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan RENSTRA dapat dilaksanakan dengan baik.

Batang, 30 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BATANG

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DPMPTSP BATANG

MARGO SANTOSA, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19770312 199803 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3 Penentuan Isu-isu Strategis 40
BAB III 42
3.1 Tujuan Perangkat Daerah 42
3.2 Sasaran Perangkat Daerah 42
3.3 Strategi Perangkat Daerah 43
3.4 Arah Kebijakan 43
BAB IV 48
4.1 Program 48
4.2 Kegiatan 69
4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif 71
4.4 Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 97
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra-PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 97
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 99
4.7 Isu Kesenjangan Gender 100
4.8 Manajemen Risiko Instansi/MRI 101
4.9 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 102
BAB V 117

5.1 Kesimpulan 117
5.2 Pengendalian dan Evaluasi 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kab. Batang 2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 8
Gambar 2. 2 Visi dan Misi Kabupaten Batang 2025 – 2029..... 27
Gambar 2. 3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Batang 2025 – 2029 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 13
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan di DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 14
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPMPTSP Kabupaten Batang 14
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 16
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 17
Tabel 2. 6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28
Tabel 2. 7 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 31
Tabel 2. 8 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 32
Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 34
Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 35
Tabel 2. 11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 36
Tabel 2. 12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 37
Tabel 2. 13 Potensi Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah 39
Tabel 2. 14 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 41
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 42
Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 44
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 45
Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 46
Tabel 3. 5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 47
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Tujuan /Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 49
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 77
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal 85
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program PrioritasPembangunan Daerah 97
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Batang periode 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Batang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

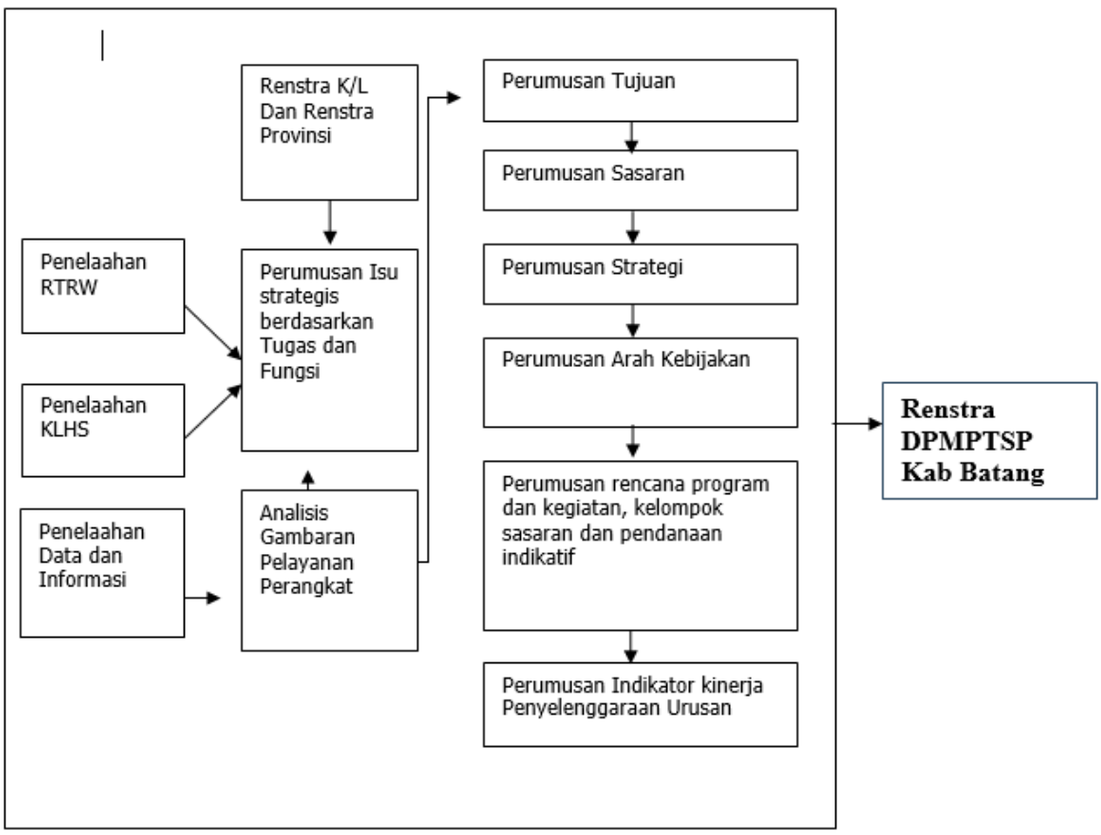
Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul guna mendukung "**Mewujudkan Kabupaten Batang yang**

Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera melalui Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing."

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan lebih lanjut Pembangunan Daerah Kabupaten Batang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini substansi penyusunannya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dari masing-masing Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kab. Batang

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang baik evaluasi Renstra maupun Evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan publik selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan publik dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dn Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025- 2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi, telaahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang 2019-2039, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan atah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja, Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan substansi, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

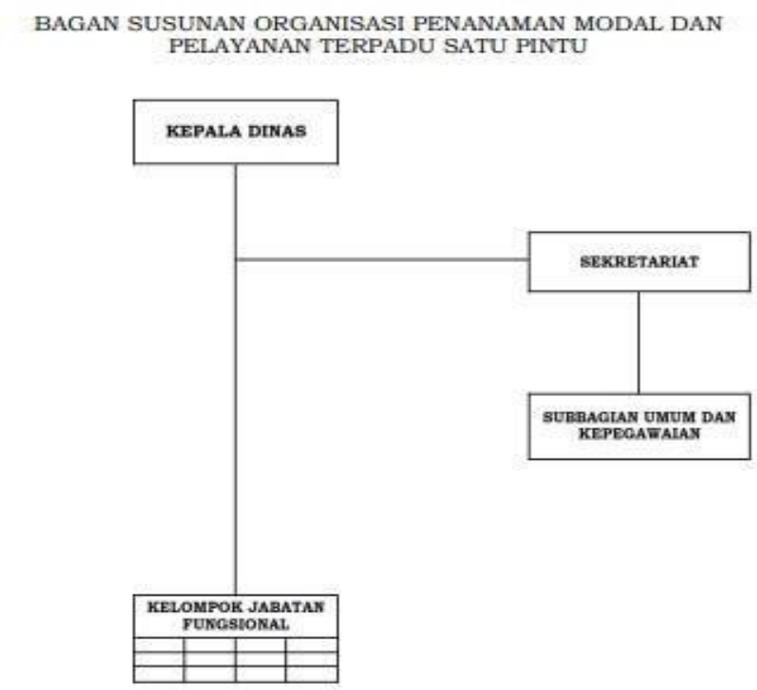
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memiliki peran utama dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terkait dengan penanaman modal dan pelayanan publik di Kabupaten Batang. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang meliputi sumber daya manusia (SDM), peralatan, teknologi dan sistem informasi, serta anggaran yang berasal dari APBD atau sumber pendanaan lain yang sah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya telah menghasilkan beberapa capaian kinerja, seperti; peningkatan kualitas layanan perizinan, tercapainya target investasi di daerah, dan penyederhanaan proses perizinan. Demikian pula melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah memperoleh capaian program prioritas perangkat daerah dan selalu berupaya dalam meningkatkan aksesibilitas daerah terhadap investasi dan pengembangan usaha.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Sekretariat;
b) pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan dan Dinas;
c) pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas;
d) pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, arsip, hukum, kerjasama dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
e) pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
f) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;

g) pengoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Dinas;
h) pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subnagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c) menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
d) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan penatausahaan kearsipan;
e) melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan dan penyusunan laporan;
f) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
g) melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
h) melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, tatalaksana, kehumasan dan keprotokolan;
i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Kerja Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;

b) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
c) Menyiapkan bahan penyusunan peta investasi;
d) Mengidentifikasi pengusaha kecil, menengah dan besar;
e) Menyiapkan bahan penyusunan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung yang dimiliki daerah;
f) Menyiapkan bahan penyusunan profil investasi proyek kemitraan;
g) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberian insentif khusus;
h) Menyelenggarakan promosi penanaman modal;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan dan promosi;
j) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
k) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
l) Menyiapkan bahan pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri atas bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan daerah;
m) Mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
n) Menyusun laporan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing serta perkembangan persetujuan dan realisasi penanaman modal;
o) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal; dan
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan

Kelompok Kerja Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang verifikasi dan validasi perizinan;
b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
c) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang verifikasi dan validasi perizinan;
d) Menyiapkan data, mengkaji, menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan;
e) Menganalisa bahan/data perizinan dan non perizinan;
f) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan dan non perizinan;
g) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
h) Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
i) Memverifikasi penyelenggaraaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
j) Melakukan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
k) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemrosesan dan penetapan perizinan;
l) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
m) Menyusun jadwal pelaksanaan survey/peninjauan lokasi perizinan;
n) Melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi persyaratan dan kelengkapan lain terhadap pengajuan permohonan perizinan;

o) Melaksanakan penghitungan, penetapan dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan;
p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pemrosesan dan penetapan perizinan;
q) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
r) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penerbitan dan dokumentasi perizinan;
s) Melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
t) Menerbitkan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan;
u) Memproses surat penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
v) Mendokumentasikan data perizinan dan non perizinan;
w) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang penerbitan dan dokumentasi perizinan; dan
x) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sejumlah 19 PNS, terdiri atas 9 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	2	-	2
2	D3	-	2	3
3	S1	4	7	10
4	S2	1	3	4

Sedangkan berdasarkan golongan ruang, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 14 orang seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan di DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	1	1
2	Golongan III	7	7	14
3	Golongan IV	1	3	4

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang meliputi peralatan dan mesin, alat angkutan, alat angkutan darat bermotor, dan kendaraan dinas bermotor perorangan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPMPTSP Kabupaten Batang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Peralatan dan Mesin	680	Baik
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	21	Baik

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah peralatan dan mesin di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang sebanyak 680 unit terdiri atas; alat pertanian sebanyak 2 unit, alat kantor sebanyak 75 unit, alat penyimpan perlengkapan kantor sebanyak 58 unit, alat rumah tangga sebanyak 368 unit, alat pembersih sebanyak 3 unit, alat pendingin sebanyak 31 unit, alat rumah tangga lainnya sebanyak 29 unit, meja dan kursi kerja/rapat sebanyak 87 unit, lemari dan arsip pejabat sebanyak 2 unit, alat studio komunikasi dan pemancar alat studio sebanyak 33 unit, peralatan studio video dan film sebanyak 14 unit, alat komunikasi sebanyak 10 unit, alat komunikasi sosial sebanyak 1 unit, alat kedokteran dan alat kesehatan sebanyak 1 unit, alat komputer sebanyak 92 unit, dan peralatan computer mainframe sebanyak 33 unit. Sementara untuk alat angkutan darat bermotor di DPMPTSP Kabupaten

Batang sebanyak 21 unit dengan rincian; mobil dinas sebanyak 4 unit dan sepeda motor dinas sebanyak 17 unit.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar)	240 M	264 M	1 T	1.5 T	2 T	6 T	7.5T	5.62T	6.17T	6.38T	3.784	1.32	-0.22	2.13	3.5
				Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang	20	20	20	20	20	65	64	20	40	86	3.25	3.20	1	2	4,3
				Jumlah Perizinan	2.000	2.000	5.100	5.200	5.300	19.451	6.467	9.226	24.424	15.025	9,72	3,23	1,80	4,69	2,83
				Jumlah realisasi	240	264	1T	1.5T	2T	6T	7.5T	5.62T	6.17T	6.38T	3.784	1.32	-0.22	2.13	3.5

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.987.500	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.655.000	1.980.000	5.000.000	2.610.615	5.000.000	88,50	100	100	91	100	3.0	3.1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	246.150.000	384.921.740	340.646.170	360.679.315	165.255.000	232.478.171	338.782.145	330.893.028	350.680.028	160.694.772	94,45	85	97,14	100	97,14	2,5	2,4
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	162.074.000	371.553.936	437.420.000	411..233.200	365.182.200	159.974.000	369.481.860	433.300.093	374.326.388	357.513.448	91,03	100	99,06	91,03	99,06	4,08	2,3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.500.000	161.500.000	208.886.000	235.941.000	31.543.750	22.643.951	161.495.820	204.660.200	235.241.200	31.543.186	92	99	97	99,70	100	9,0	8,94
Penyediaan jasa kebersihan kantor	162.074.000	96.000.000	87.000.000	132.597.900	198.441.000	159.974.000	96.000.000	87.000.000	132.230.548	198.203.900	96	100	100	100	100	3,6	3,6

Penyediaan alat tulis kantor	42.144.000	49.660.000	49.065.000	40.00.000	109.138.500	42.144.000	49.660.000	49.065.000	40.000.000	109.138.500	100	100	100	100	100	5,8	5,8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.950.000	85.660.000	49.910.000	44.998.000	54.996.000	17.950.000	85.241.600	49.910.000	44.988.600	54.996.000	100	97	100	99,98	100	5,1	5,11
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.280.000	6.975.600	6.976.700	6.958.200	17.980.000	5.280.000	6.975.000	6.976.700	6.958.200	17.980.000	100	100	100	100	100	1,0	1,0
Penyediaan peralatan rumah tangga	13.500.000	23.482.000	56.386.600	20.207.000	6.234.000	13.500.000	23.308.800	56.307.500	20.207.000	6.234.000	100	100	99,86	100	100	9,5	10,1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.696.000	3.696.000	3.996.000	3.996.000	6.900.000	3.696.000	3.696.000	3.996.000	3.996.000	6.875.000	100	100	100	100	100	4,70	4,75.
Penyediaan makanan dan minuman	72.760.2000	79.265.000	79.160.000	79.815.000	40.577.000	71.925.000	79.229.000	78.302.000	79.485.000	40.577.000	98,7	99,3	98,92	100	100	6,5	6,08.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70.451.1649	50.908.300	88.852.500	104.936.679	135.500.000	69.692.000	50.882.950	88.815.000	104.873.807	135.496.700	98,9	99,2	99,96	100	100	10,0	9,9
Penyediaan jasa pengamanan kantor	180.600.000	-	177.600.000	178.000.000	308.560.000	174.300.000	-	177.600.000	178.000.000	308.560.000	94,5	-	100	100	100	2,50	2,520
Pengelolaan keuangan SKPD	45.800.000	10.050.000	88.825.500	39.500.000	39.875.000	45.800.000	10.050.000	88.815.000	39.500.000	39.871.550	100	100	99,96	100	99	5,5	5,44
Pengadaan kendaraan dinas/	-	-	-	303.000.000	-	-	-	-	292.060.000	-	-	-	-	96	-	0	0

operasional																	
Pengadaan peralatan gedung kantor	411.000.000	20.181.860	85.566.600	116.000.000	259.025.000	384.555.700	20.020.000	84.837.500	113.998.600	258.812.000	93	99,2	98,8	98,2	99	1,78.	1,73
Pembangunan Gedung Kantor	778.900.000	-	-	-	-	772.133.200	-	-	-	-	99	-	-	-	-	0	0
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	70.000.000	-	49.500.000	289.450.000	300.550.000	69.976.950	-	49.390.000	247.438.000	299.494.000	99,78	-	99,78	85,4	98	1,7	1,63
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	150.474.000	24.500.000	205.256.000	161.450.000	154.240.000	139.536.249	24.500.000	201.030.200	157.169.500	154.239.785	92,7	100	97,94	97,3	99	13	13
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	48.850.000	32.500.000	79.840.000	25.000.000	66.950.000	48.850.000	32.500.000	78.982.000	25.000.000	66.950.000	100	100	98,93	100	100	4.11	4.11
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	18.000.000	-	47.200.000	20.160.000	29.904.000	18.000.000	-	47.200.000	20.160.000	29.904.000	100	-	100	100	100	8.88	8.78
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000	6.000.000	6.000.000	8.500.000	9.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	8.500.000	9500000	100	100	100	100	100	2,5	2,48
Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha	-	-	-	168.205.900	-	-	-	-	167.892.500	-	-	-	-	98,8	-	0	0
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/	-	48.050.500	88.750.000	-	-	-	44.675.500	88.227.500	-	-	-	92,9	98	-	-	4,0	3,9

insentif dan kemudahan penanaman modal																
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	102.100.000	347.415.450	684.250.000	-	-	101.600.000	344.231.660	614.054.346	-	-	89,74	99	89,74	-	-	3,15	3,14
Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	328.340.500	227.262.000	200.000.000	-	-	180.790.000	192.605.400	197.594.850	-	-	55	84,7	98,80	-	-	-7.5	-7.3
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	36.000.000	62.352.534	76.818.250	-	-	31.605.300	61.892.600	76.418.700	-	-	87,59	98	99	-	-	16.9	16.9
Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	50.820.000	281.845.700	-	-	-	18.225.800	267.180.100	-	-	-	35,8	94,80	-	-	20,29	20,27

Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelakasanaan penanaman modal	-	94.380.000	134.348.300	-	-	-	15.956.300	125.863.000	-	-	-	16,9	93,68	-	-	3,9	3,8
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	-	-	-	223.865.000	-	-	-	-	222.251.000	-	-	-	-	99	5,3	5,3
Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-	25.000.000	21.600.000	-	-	-	20.302.000	21.585.000	-	-	-	81	99	3,4	3,2
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	80.000.000	78.485.000	-	-	-	71.432.600	76.173.300	-	-	-	89	97	-	-	-	1,5	1,4
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah	23.545.000	-	-	62.200.000	71.800.000	22.810.000	-	-	62.200.000	71.700.000	96	-	-	100	99	5,2	4,7
Peningkatan kegiatan pemantauan,	-	-	200.000.000	56.400.000	67.725.000	-	-	197.594.850	56.390.000	66.673.250	-	-	98,80	95	99	7,9	6,8

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal																	
Penyelenggaraan pameran investasi	9.785.000	-	-	13.818.000	16.420.000	9.185.000	-	-	13.716.800	16.416.939	93	-	-	99	99	2,0	2,0
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	-	-	-	51.700.000	65.000.000	-	-	-	50.346.000	61.999.500	-	-	-	97	95	10,3	10,2
Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu	102.100.000	-	-	-	-	101.600.000	-	-	-	-	99,5	-	-	-	-	5,0	5,0
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	21.531.634	-	-	-	-	21.387.000		-	-	-	99	-	-	-	-	2.15	2.13
Pelayanan pengaduan masyarakat	36.000.000	-	-	-	-	31.605.300	-	-	-	-	87	-	-	-	-	3,6	3,16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	81.820.000	103.515.400	-	-	-	78.950.735	97.703.400	-	-	-	96	94	9,26	8,83
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	380.748.500	-	-	331.820.000	389.300.000	369.838.050	-	-	320.622.000	389.129.000	94	-	-	95	99	3,6	3,5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang secara umum baik dan stabil, namun terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian peningkatan koordinasi lintas bidang, perencanaan berbasis kinerja, dan monitoring yang lebih intensif akan membantu menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Realisasi Investasi

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanaman modal dan perizinan yaitu masyarakat umum dan pelaku usaha, investor lokal dan luar daerah. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, serta Asosiasi Usaha.

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

a) Menurunnya kualitas dukungan pelayanan umum (kebersihan, keamanan, logistik kantor)
b) Terbatasnya anggaran operasional rutin

b. Permasalahan terkait Kelompok Kerja Penanaman Modal

a) Menurunnya realisasi investasi pada sektor-sektor UMKM, terutama dari investor luar daerah.
b) Belum optimalnya promosi dan penyediaan informasi peluang investasi Kabupaten Batang secara terstruktur dan digital.
c) Tingginya ketergantungan investor terhadap perizinan dari instansi vertikal (pusat/provinsi), yang berdampak pada keterlambatan realisasi.

c. Permasalahan terkait Kelompok Kerja Perizinan

a) Belum optimalnya penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) oleh pelaku usaha, terutama UMKM.
b) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses perizinan dan non perizinan, yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap pendampingan langsung.

c) Belum optimalnya kecepatan dan kepastian waktu pelayanan perizinan, khususnya dalam layanan yang melibatkan verifikasi teknis lintas sektor.

Berdasarkan hasil analisis pada RPJMD sebelumnya terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, sebenarnya pengembangan penanaman modal di Kabupaten Batang memiliki peluang yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari:

1. Besarnya minat calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang
2. Adanya Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batang
3. Potensi sumber daya dan infrastruktur pendukung penanaman modal yang tersedia.
4. Tersedianya UMKM potensial untuk dikembangkan.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, tentunya Kabupaten Batang memiliki peluang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya tantangan yang menghadang. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Tingkat persaingan antar daerah yang sangat kompetitif.
2. Kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap minat investasi di suatu daerah
3. Perlu adanya penyesuaian Perda RTRW (perlu menetapkan kawasan Industri);
4. Perlu pembangunan infrastruktur pendukung (pelabuhan, jalan dan jaringan listrik)

Peluang pengembangan penanaman modal di Kabupaten Batang saat ini adalah:

1. Adanya Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batang
2. Adanya PLTU yang berskala nasional di Kabupaten Batang
3. Tingginya minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang
4. Tersedianya UMKM yang potensial untuk dikembangkan
5. Keberadaan teknologi informasi yang semakin canggih.
6. Destinasi Wisata Pantai dan Alam Pedesaan.

2.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati Batang yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

''Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing
Menuju Indonesia Emas 2045''

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

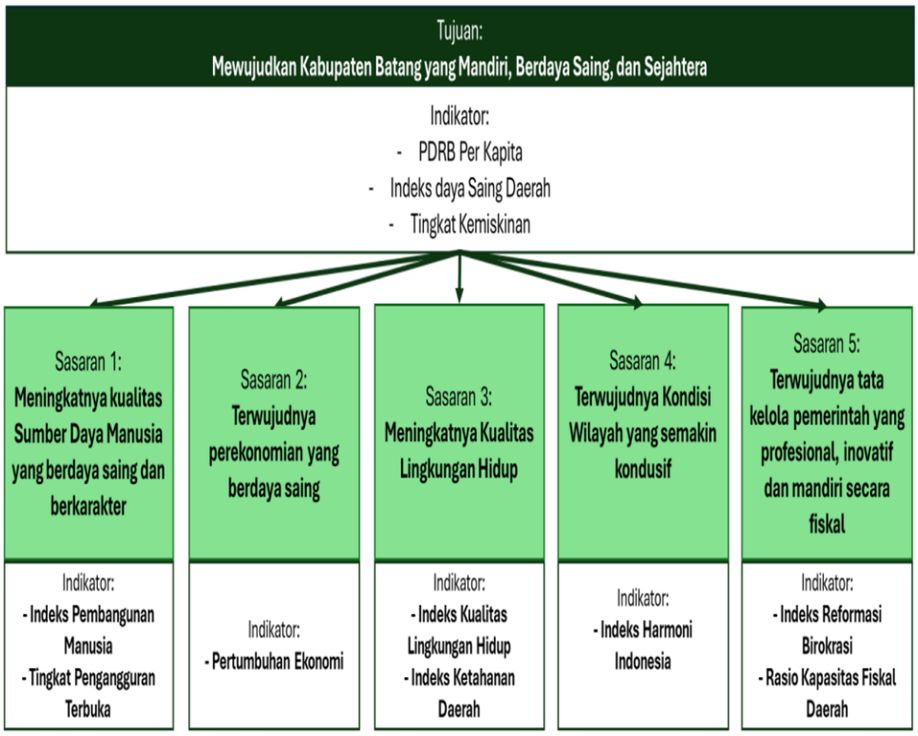
1. Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya, dan Harmonis;
2. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat secara Menyeluruh;
3. Menjadikan Batang sebagai Pusat Industri dan Mendukung Hilirisasi Berbasis Alih Teknologi yang Ramah Lingkungan;
4. Akselerasi Ekonomi;
5. Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa;
6. Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelamjutan;
7. Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata, dan Berorientasi pada Keadilan Sosial; dan
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahanan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas.



Gambar 2. 2 Visi dan Misi Kabupaten Batang 2025 – 2029

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengarah pada pencapaian unsur visi: ’Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045’’. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 dan ke-4: Menjadikan Batang sebagai Pusat Industri dan Mendukung Hilirisasi Berbasis Alih Teknologi yang Ramah Lingkungan dan Akselerasi Ekonomi, dengan tujuan meningkatkan iklim investasi daerah dan kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan berbasis teknologi. Adapun sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Batang,
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan,
3. Terbangunnya sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan berkelanjutan,
4. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi investasi yang efektif dengan para stakeholder (pengusaha, OPD teknis, dan pemerintah pusat),
5. Terwujudnya kemudahan berusaha melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur pelayanan.



Gambar 2. 3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Batang 2025 – 2029

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Misi ke-3: Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi dan ramah lingkungan Misi ke-4: Akselerasi ekonomi	- Proses perizinan yang masih rumit dan memakan waktu - Kurangnya sosialisasi tentang kemudahan investasi kepada masyarakat dan pelaku usaha - Keterbatasan koordinasi antar instansi terkait	- Sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital - Terbatasnya anggaran untuk promosi dan pelatihan - Birokrasi yang berbelit-belit	- Dukungan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten - Komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan prima - Adanya inovasi pelayanan dan penggunaan aplikasi OSS *(Online Single Submission)*
2	Tujuan: Meningkatkan investasi dan kemudahan pelayanan perizinan			
3	Sasaran: Mempercepat proses perizinan dan meningkatkan jumlah investasi			

2.2.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (bagi Kabupaten Batang)

2.2.2.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 adalah ‘’Mengelola Layanan Investasi Nasional melalui Manajemen Pelayanan Penanaman Modal yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.’’

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal ke arah pelayanan prima
2. Membangun birokrasi yang *agile*, responsif, dan optimal dalam layanan investasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka tujuan pembangunan investasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan realisasi investasi nasional secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Menyediakan layanan perizinan berbasis risiko (OSS RBA) yang responsif, cepat, dan berorientasi layanan prima.
3. Mendukung hilirisasi dan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam periode 2025- 2029 adalah :

1. Realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 15 % per tahun, dengan target secara kumulatif Rp 13.032,8 triliun selama 2025–2029.
2. Pelayanan perizinan investasi yang semakin mudah, transparan, dan cepat melalui OSS RBA dan digitalisasi sistem.
3. Pengembangan investasi berkualitas dan ramah lingkungan, termasuk penerapan ESG dan *green investment* sebagai standar baru pelayanan investasi.
4. Hilirisasi sektor strategis (mineral, pertanian, energi, kelautan) sebagai pendorong nilai tambah lokal dan ketahanan ekonomi Indonesia.
5. Sinergi optimal antara BKPM, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan swasta untuk mempercepat realisasi investasi dan pelayanan prima.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mendukung pencapaian sasaran ke 2 dan 3 yaitu “Pelayanan perizinan investasi yang semakin mudah, transparan, dan cepat melalui OSS RBA dan digitalisasi sistem” dan “Pengembangan investasi berkualitas dan ramah lingkungan, termasuk penerapan ESG dan *green investment* sebagai standar baru pelayanan investasi.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 15 % per tahun	Minimnya promosi potensi investasi daerah ke luar daerah atau luar negeri	Keterbatasan anggaran promosi sehingga kegiatan pameran, misi dagang, atau forum investasi ke luar daerah/luar negeri jarang dilakukan	Potensi unggulan daerah yang berdaya saing (misalnya sektor industri, pariwisata, pertanian, perikanan, energi terbarukan, dll.) sehingga perlu dipromosikan lebih luas
2	Pelayanan perizinan investasi yang semakin mudah, transparan, dan cepat melalui OSS RBA dan digitalisasi sistem	Kurangnya SDM yang kompeten di bidang OSS dan perizinan sektor tertentu	Terbatasnya jumlah pegawai yang benar-benar memahami OSS RBA dan aturan sektoral (karena kompleksitas regulasi)	Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga memerlukan SDM yang profesional
3	Pengembangan investasi berkualitas dan ramah lingkungan	Belum semua perizinan memasukkan aspek lingkungan secara memadai	Belum tersedia sistem informasi investasi yang menampilkan potensi, profil lingkungan, dan peluang investasi hijau	Dukungan masyarakat terhadap investasi yang ramah lingkungan
4	Hilirisasi sektor strategis (mineral, pertanian, energi, kelautan) sebagai pendorong nilai tambah lokal dan ketahanan ekonomi Indonesia	Minimnya minat investasi hilir karena keterbatasan infrastruktur dan insentif daerah	Ketergantungan pada teknologi asing dalam pengolahan mineral dan energi	Tren global menuju ekonomi hijau membuka peluang ekspor baru
5	Sinergi optimal antara BKPM, kementerian teknis, pemerintah daerah,	Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam	Mekanisme koordinasi belum terlembaga secara	Implementasi OSS-RBA *(Online Single*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan swasta untuk mempercepat realisasi investasi dan pelayanan prima	pelayanan perizinan terpadu	konsisten di semua daerah.	*Submission Risk-Based Approach)* yang menyatukan layanan perizinan pusat dan daerah

2.2.2.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan daya tarik dan realisasi investasi Jateng
2. Pemerataan dan kualitas investasi, termasuk persebaran yang lebih inklusif menuju semua kabupaten/kota.
3. Implementasi dan percepatan hilirisasi sektor strategis
4. Promosi dan kerja sama investasi yang aktif
5. Pelayanan perizinan yang prima dan regulasi mendukung
6. Investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mendukung pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ke 1 dan 5 yaitu “Meningkatkan daya tarik dan realisasi investasi Jateng” dan “Pelayanan perizinan yang prima dan regulasi mendukung.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Faktor

	Menengah Renstra K/L	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan daya tarik dan realisasi investasi	Kurangnya promosi aktif dan pemutakhiran profil investasi daerah	Proses perizinan teknis yang masih memerlukan waktu lama di instansi sectoral	Iklim sosial-politik yang stabil meningkatkan kepercayaan investor
3	Pelayanan perizinan yang prima dan regulasi mendukung	Proses OSS berjalan, tapi belum optimal pada semua sector	Aplikasi OSS yang terkadang error	Mudahnya bagi pelaku usaha untuk mengakses OSS

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 2019-2039 luas seluruh wilayah Kabupaten Batang kurang lebih 85.721 Ha, terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertanahan dan keamanan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif telah disusun masterplan pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Batang yang membagi wilayah ke dalam lima zona pengembangan yaitu:

1. Zona Pertanian dan Agro Wisata, mencakup wilayah Kecamatan Wonotunggal, Warungasem, Bandar, Blado, Reban, Bawang, dan Tersono. Berfokus pada pengembangan sektor agroproduksi dan agroindustri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemasaran komoditas lokal unggulan.
2. Zona Industri, mencakup wilayah Kecamatan Subah, Banyuputih, Gringsing, Limpung, dan Tulis. Dan peruntukan sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi nasional, Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Batang Industropolis dan Batang Industrial Park menjadi motor utama penggerak ekonomi Kabupaten Batang dengan sektor

manufaktur, otomotif, elektronik, dan industri berbasis teknologi tinggi.

3. Zona Bahari, zona ini berlokasi di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman. Berfokus pada pengembangan wisata bahari dan sektor perikanan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya tarik wisata serta kesejahteraan nelayan.
4. Zona Pendidikan, zona ini berada di Kecamatan Bandar sebagai pusat pengembangan akademik dan dirancang sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dengan fasilitas pendidikan berkualitas, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.
5. Zona Pemerintahan, zona ini berada di Kecamatan Batang dan difokuskan sebagai kawasan perkantoran dan pusat layanan publik yang terintegrasi, dengan konsep tata ruang yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Mendasarkan RTRW Kabupaten Batang, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang harus memperhatikan pola ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Zona Industri	Kurangnya sinkronisasi antar sektor dalam penyediaan infrastruktur pendukung	Keterbatasan penerapan *green industry* dan konsep industri berwawasan	Sinkronisasi kebijakan perencanaan ruang dengan arah investasi (RTRW,

			lingkungan	RDTR, RPJMD, dan RPJMN)

2.2.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan peningkatan jumlah realisasi nilai investasi di Kabupaten Batang dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

2.2.4. Telaah Isu Regional, Nasional dan Global

2.2.4.1 Telaah Isu Regional

Berdasarkan analisis isu regional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengidentifikasi bahwa isu rendahnya kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri dan keterbatasan lahan yang telah sesuai RTRW merupakan isu utama. Isu ini berpotensi/menimbulkan permasalahan bagi penanaman modal dan pelayanan khususnya terkait dengan hambatan dalam pelayanan perizinan investasi, keterlambatan realisasi investasi, serta kesenjangan antara minat investor dan kesiapan wilayah Kabupaten Batang. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memandang perlu terobosan langkah penyediaan layanan perizinan yang cepat dan tepat guna di zona industri strategis.

Tabel 2. 10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Isu Regional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Isu Regional	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Keterbatasan	Terhambatnya	Keterlambatan	Adanya proyek

	infrastruktur dan legalitas ruang di kawasan industry	pelayanan perizinan investasi dan kesenjangan antara permintaan investasi dengan kesiapan wilayah	pembangunan infrastruktur akibat kendala lahan dan pendanaan	infrastruktur strategis nasional (jalan tol, pelabuhan, rel kereta, bandara) yang mendukung akses ke kawasan industri
2	Ketimpangan wilayah antara zona pantura industri dengan wilayah tengah dan Selatan	Pemerataan pelayanan perizinan dan promosi investasi belum optimal di wilayah non-industri	Dukungan regulasi tata ruang dan kebijakan investasi daerah untuk mendorong pembangunan kawasan industri di luar Pantura	Keterampilan tenaga kerja di wilayah tengah dan selatan belum sesuai kebutuhan industri.

2.2.4.2 Telaah Isu Nasional

Penelaahan isu nasional menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang perlu mencermati isu percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi berkualitas dan berkelanjutan, sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029 dan kebijakan nasional terkait kemudahan berusaha.

Isu ini secara signifikan mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan reformasi pelayanan perizinan, termasuk perbaikan sistem, kapasitas SDM, dan kesiapan regulasi daerah. Isu ini secara signifikan membatasi efektivitas pelayanan apabila sistem nasional (seperti OSS-RBA) belum berjalan optimal atau belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan lokal. Untuk merespons hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang perlu melakukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelayanan digital, dan pendekatan promotif terhadap investor potensial, terutama di sektor industri.

Tabel 2. 11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Isu Nasional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Isu Regional	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan promosi investasi di daerah	Kurangnya promosi dan informasi peluang investasi yang efektif	Deregulasi dan penyederhanaan perizinan melalui OSS-RBA
2	Penguatan pelayanan publik berbasis digital dan integratif	Terbatasnya infrastruktur dan sistem layanan digital yang responsif terhadap kebutuhan investor	Minimnya pelatihan teknis dan manajerial terkait transformasi digital	Akses internet yang semakin luas dan cepat

2.2.4.3 Telaah Isu Global

Dari perspektif isu global, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengamati bahwa Isu-isu perubahan iklim, transisi energi hijau, dan tren investasi berkelanjutan *(Environmental, Social, and Governance/ESG)* menjadi perhatian utama dalam ekonomi global saat ini.

Isu global ini memiliki dampak yaitu meningkatnya tuntutan terhadap praktik investasi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan keterbukaan informasi bagi investor asing maupun lembaga pendanaan internasional. Hal ini secara langsung memengaruhi pola perizinan, promosi investasi, dan penyusunan strategi pembangunan kawasan industri di daerah. Sebagai antisipasi dan adaptasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berencana untuk memperkuat promosi investasi hijau *(green investment)*, meningkatkan literasi ESG di kalangan pelaku usaha daerah, serta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dalam memfasilitasi investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel 2. 12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Isu Global beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Isu Global	Permasalahan	Faktor

		Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Tren investasi global berbasis ESG *(Environmental, Social, Governance)*	Belum optimalnya fasilitasi dan promosi investasi yang berbasis prinsip keberlanjutan	Belum banyak kawasan industri yang menerapkan konsep eco-industrial park	Peningkatan kesadaran publik terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
2	Perubahan iklim dan tuntutan pengurangan emisi karbon	Kurangnya kesiapan dalam mengarahkan investasi menuju sektor ramah lingkungan dan rendah karbon	Biaya transisi energi yang tinggi dan belum tersedia insentif yang cukup	Digitalisasi sistem monitoring dan pelaporan emisi karbon

2.2.5. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perizinan, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal di berbagai sektor strategis daerah Kabupaten Batang

Modal potensi daerah yang relevan dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang meliputi:

1. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai pusat investasi strategis berskala nasional
2. Kawasan Industri Batang (KIB) zona industri pengembangan baru di Kecamatan Tulis, Limpung, Gringsing, dan Banyuputih yang potensial sebagai klaster industri pendukung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang akan berfokus pada pemanfaatan potensi pengembangan zona industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing investasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Mempercepat fasilitasi perizinan berusaha di kawasan industri melalui sistem OSS berbasis risiko.

2. Mengintegrasikan data potensi lahan dan infrastruktur ke dalam sistem promosi investasi berbasis digital.
3. Melakukan promosi aktif melalui forum bisnis, pameran investasi, dan kerja sama dengan BKPM, investor asing, dan BUMN pengelola KIT.
4. Mendorong sinkronisasi peraturan zonasi (RDTR) dengan RTRW agar kawasan industri baru dapat difungsikan secara legal dan efisien.
5. Menyediakan layanan investasi terpadu berbasis teknologi yang mudah diakses oleh investor, termasuk desk layanan cepat (helpdesk) di kawasan industri.

Tabel 2. 13 Potensi Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah yang mendukung Pelayanan Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah	Dukungan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	- Mefasilitasi perizinan usaha melalui OSS-RBA - Promosi investasi melalui forum bisnis nasional/internasional - Pendampingan realisasi investasi strategis - Koordinasi dengan BKPM dan pengelola KIT	Keterampilan tenaga kerja lokal belum seluruhnya memenuhi kebutuhan industri berteknologi tinggi (otomotif, elektronik, dan baterai)	Dukungan langsung dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM
2	Kawasan Industri Batang	- Identifikasi potensi zona		

	(KIB)	industri baru di Tulis, Gringsing, dan Limpung - Pendampingan izin pembangunan kawasan industri baru - Koordinasi RDTR dengan Dinas PUPR - Penyusunan daftar proyek investasi (DIK)		

2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Keterbatasan legalitas ruang dan infrastruktur di zona industri baru Kawasan Industri Batang (KIB) yang menghambat kelancaran realisasi investasi.
2. Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi pelayanan dan sistem informasi investasi, yang berdampak pada efektivitas perizinan dan promosi investasi.
3. Minimnya daya saing investasi lokal di Kabupaten Batang terhadap tren global investasi hijau dan berkelanjutan (ESG) yang menjadi syarat bagi banyak investor asing.

Untuk memfasilitasi proses penyimpulan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang sistematis dan terstruktur, dapat digunakan sebuah tabel kerja.

Integrasi data ini akan mengarah pada perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang holistik, relevan, dan terfokus, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program kerja yang efektif.

Tabel 2. 14 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Regional	Nasional	Global	
1	Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	Belum seluruh kawasan sesuai RTRW dan RDTR	Kebutuhan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang dan perlunya pengendalian dampak lingkungan	Tekanan keterbatasan tata ruang legal	Transformasi ekonomi berbasis investasi berkualitas	Tuntutan investasi hijau berbasis ESG	Keterbatasan legalitas tata ruang dan kesiapan infrastruktur zona industri
2	Kawasan Industri Batang (KIB)	Promosi dan pelayanan belum terintegrasi	Adanya ketimpangan pertumbuhan wilayah dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan	Dominasi sektor industri besar di KITB	Peningkatan investasi berkelanjutan (ekonomi hijau)	Digitalisasi layanan global	Minimnya daya saing investasi lokal terhadap trend investasi berkelanjutan (ESG)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 yaitu "**Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Batang"**.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah "**Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Batang."**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan realisasi nilai investasi		Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Batang	-0,22	3,5	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya jumlah	Persentase peningkatan	-	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4

		perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang	perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang								
		Meningkatnya kinerja akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,54	4,55	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59	4,60
			Nilai SAKIP	74,90	75,80	76,55	76,60	76,70	76,80	76,90	77,00

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah dirumuskan dengan target kinerja tujuan/sasaran pada periode Renstra 2025-2029 dengan peningkatan atau pertumbuhan setiap tahunnya serta telah mempertimbangkan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan peningkatan realisasi nilai investasi di Kabupaten Batang.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan promosi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur bidang penanaman modal
3. Meningkatkan ketersediaan informasi terkait penanaman modal
4. Teratasinya pengaduan masyarakat terkait kendala atau pengaduan yang timbul dari dampak perijinan dan non perijinan
5. Semakin mudahnya akses sistem informasi dan data bagi masyarakat umum dan pelaku usaha

3.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Penahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Promosi investasi melalui event pameran maupun *bussiness gathering*
2. Mendorong terwujudnya kemitraan usaha
3. Optimalisasi teknologi sistem informasi sebagai sarana promosi digital
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis bidang penanaman modal
5. Penyusunan kebijakan yang pro investasi bagi para pelaku usaha
6. Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
7. Sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perijinan
8. Kajian/updating potensi/peluang investasi
9. Penyusunan peta potensi peluang investasi

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029 "Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045					
Tahapan Pembangunan Kabupaten Batang					
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Pelaksanaan Zonasi (Industri, Agro, Bahari), Digitalisasi, Pelayanan Publik	Penguatan Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Industri Ramah Lingkungan	Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Batang Maju dan Mandiri	Perwujudan Kabupaten Batang yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan realisasi nilai investasi		Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Batang	4	5	6	7	8	9	Dengan adanya target peningkatan pertumbuhan nilai investasi setiap tahun, maka diharapkan akan membuat perekonomian Kabupaten Batang semakin meningkat
		Meningkatnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Dengan adanya target peningkatan perusahaan yang berinvestasi setiap tahun di Kabupaten Batang, maka diharapkan akan membuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Batang semakin meningkat dan menaikkan realisasi investasi

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah sesuai dengan NSPK terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Batang 2025- 2030 yaitu **"Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing".** Dengan adanya program dan indikator pada tabel di atas maka diharapkan target capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat memberikan kontribusi dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Batang kedepannya.

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Perekonomian Rakyat Berbasis Pangan dan Akses Pangan di Kabupaten Batang dengan terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM.	Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Iklim Investasi di Objek Pariwisata Strategis di Kabupaten Batang.	Peningkatan Ekonomi melalui Penanaman Modal Berbasis Potensi Lokal dan Industri Ramah Lingkungan *(Batang Clean Indutrial City).*	Peningkatan Daya Saing Daerah menuju Batang Maju dan Mandiri dengan Meningkatkan Daya Tarik Investasi di Kabupaten Batang.	Perwujudan Kabupaten Batang yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Peningkatan Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Batang

Tabel 3. 5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Batang	Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan promosi dan fasilitasi penanaman modal berbasis potensi unggulan daerah	
2.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang		Meningkatkan iklim investasi melalui pelaksanaan fasilitasi dan pengendalian penanaman modal berbasis risiko	

BAB IV

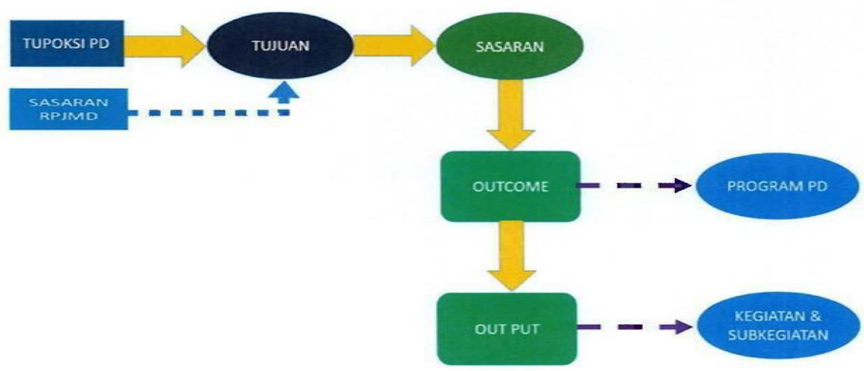
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya.

Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang secara umum berpedoman pada kerangka di bawah ini:



Sumber : Inmendagri No.2 Tahun 2025

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan program/Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Dari kerangka di atas dapat diuraikan dalam Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Tujuan /Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE	TARGET												OPD PENGAMPU/ BIDANG PENGAMPU
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								2024	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
					PDRB Per Kapita																
					Pertumbuhan Ekonomi																
	Meningkatnya realisasi nilai investasi				Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	%	**Jumlah realisasi nilai investasi tahun n dikurangi Jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) : jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) x 100**	3,5		4		5		6		7		8		9	DPMPTSP

		Meningkatnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang			Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	%	**Jumlah perusahaan tahun n dikurangi Jumlah perusahaan tahun (n-1) : jumlah perusahaan tahun (n-1) x 100**	3		3,5		3,6		3,7		3,8		3,9		4	DPMPTSP
1.			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang kondusif**	**Realisasi total terhadap target Investasi**	%	**Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun (n-1) x 100**	**3**	**65.937.370**	**3,5**	**262.193.000**	**3,6**	**119.600.000**	**3,7**	**124.381.000**	**3,8**	**129.322.000**	**3,9**	**134.534.100**	**4**	Urusan Penanaman Modal
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen terkait pemberian fasilitasi/ insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	1	65.937.370	1	110.193.000	1	114.600.000	1	119.181.000	1	123.914.000	1	128.910.100	1	Urusan Penanaman Modal
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	NA	33.708.250	1	77.000.000	1	80.080.000	1	83.280.000	1	86.614.000	1	90.079.100	1	Urusan Penanaman Modal

			Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama pelaku usaha	NA	32.229.120	1	33.193.000	1	34.520.000	1	35.901.000	1	37.300.000	1	38.831.000	1	Urusan Penanaman Modal
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	0	0	0	152.000.000	0	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.000	1	
			Penyusunan peta potensi investasi Kabupaten / Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen / Peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen / peta digital potensi investasi yang di buat/disusun	1	0	0	152.000.000	0	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.000	1	Urusan Penanaman Modal
2.			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Terlaksannya Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi di Kabupaten Batang**	**Dokumen**	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	**100**	**72.730.425**	**100**	**150.000.000**	**100**	**231.000.000**	**100**	**237.240.000**	**100**	**243.700.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Dokumen	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	1	72.730.425	1	150.000.000	1	231.000.000	1	237.240.000	1	243.700.000	1	250.000.000	1	Urusan Penanaman Modal

			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	1	72.730.425	1	150.000.000	1	156.000.000	1	162.240.000	1	168.700.000	1	175.000.000	1	Urusan Penanaman Modal
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	NA	0	0	0	0	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	Urusan Penanaman Modal
3.			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Perushaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal**	**%**	**Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dibagi Jumlah Perusahaan di kali 100**	**NA**	**156.077.000**	**25**	**120.000.000**	**30**	**135.000.000**	**35**	**150.000.000**	**40**	**165.000.000**	**45**	**126.000.000**	**50**	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Jumlah Perusahaan yang mematuhi Pelaksanaan Penanaman Modal	20	156.077.000	20	120.000.000	20	135.000.000	20	150.000.000	20	165.000.000	20	126.000.000	20	DPMPTSP

			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	Jumlah Perusahaan yang telah Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6	25.480.000	6	40.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	DPMPTSP
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20	55.941.000	10	40.000.000	20	45.000.000	25	50.000.000	30	55.000.000	35	60.000.000	40	DPMPTSP

			Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	NA	74.656.000	12	40.000.000	15	45.000.000	17	50.000.000	20	55.000.000	23	6.000.000	25	DPMPTSP
4.			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Terlaksanannya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**	**Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan**	**%**	**Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100**	**85**	**358.956.560**	**86**	**346.890.200**	**87**	**360.849.500**	**88**	**375.260.000**	**89**	**389.866.000**	**90**	**407.029.000**	**91**	DPMPTSP

			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	55	358.956.560	60	346.890.200	65	360.849.500	70	375.260.000	75	389.866.000	80	407.029.000	85	PTSP
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah Ijin yang diterbitkan	5100	270.906.800	5200	270.136.250	5300	280.941.700	5400	292.200.000	5500	303.800.000	5600	317.000.000	5700	PTSP

			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah layanan konsultasi yang diterima dibagi jumlah layanan konsultasi yang diselesaikan dikali 100 %	2	55.316.950	3	44.246.450	4	46.100.000	5	47.900.000	6	49.500.000	7	52.000.000	8	PTSP
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	Jumlah Usaha yang dipantau	35	32.732.810	37	32.507.500	40	33.807.800	42	35.160.000	44	36.566.000	46	38.029.000	48	PTSP

5.			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Terlaksannya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data yang telah dicukupi**	**%**	**Jumlah Prosentase data dan sistem Informasi Penanaman Modal yang telah dicukupi**	**100**	**67.019.560**	**100**	**63.591.651**	**100**	**66.135.000**	**100**	**68.780.000**	**100**	**71.531.000**	**100**	**74.393.000**	**100**	PTSP
			Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	67.019.560	20	63.591.651	23	66.135.000	25	68.780.000	27	71.531.000	30	74.393.000	35	PTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	NA	67.019.560	20	63.591.651	23	66.135.000	25	68.780.000	27	71.531.000	30	74.393.000	35	DPMPTSP

		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di DPMPTSP Kab. Batang		Terselenggaranya layanan publik yang berkualitas dan profesional	1. Indek Pelayanan Publik (IPP)	Skor indek (0-4)	(Σ Skor Tiap Aspek × Bobot Aspek) ÷ Skor Maksimal	**4,55**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**###**	**0**	**4,56**	DPMPTSP
				Terselenggaranya layanan publik yang berkualitas dan akuntabel berbasis teknologi informatika	2. Nilai SAKIP	Skor (0-100)	Mengacu pada hasil evaluasi dari Kementerian PANRB terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi (menggunakan pedoman PermenPANRB tentang evaluasi SAKIP)	76		76,55		76,6		76,7		76,8		76,9		77	DPMPTSP

6.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**Jumlah Kebutuhan Penunjang yang terpenuhi : Total Kebutuhan Penunjang yang direncanakan x 100**	**98**	**3.498.677.396**	**98,1**	**3.907.855.957**	**98,2**	**4.051.459.021**	**98,3**	**4.234.863.869**	**98**	**4.334.352.395**	**99**	**4.575.581.850**	**98,6**	DPMPTSP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5	6.511.000	5	12.011.000	5	12.491.440	5	12.991.098	5	13.510.742	5	14.051.171	5	DPMPTSP
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Σ (Total dokumen Laporan Capaian Kinerja + Ikhtisar Realisasi Kinerja + Laporan Hasil Koordinasi) dalam satu tahun anggaran	5	6.511.000	5	12.011.000	5	12.491.440	5	12.991.098	5	13.510.742	5	14.051.171	5	DPMPTSP

				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	2.304.500.421	1	2.341.583.088	1	2.440.245.800	1	2.537.801.300	1	2.571.408.000	1	2.744.119.000	1	DPMPTSP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	2.273.384.421	19	2.310.467.088	19	2.402.885.800	19	2.499.001.300	19	2.531.000.000	19	2.702.919.000	19	DPMPTSP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	NA	31.116.000	2	31.116.000	2	32.360.000	2	33.600.000	2	35.000.000	2	35.500.000	2	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	1	0	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.700.000	1	DPMPTSP

				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Orang	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2	0	2	25.000.000	2	26.037.440	2	27.078.938	2	28.162.095	2	29.288.579	2	DPMPTSP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	0	2	25.000.000	2	26.037.440	2	27.078.938	2	28.162.095	2	29.288.579	2	DPMPTSP
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	NA	163.555.450	1	233.521.900	1	242.825.336	1	252.538.349	1	262.639.883	1	273.145.479	1	DPMPTSP
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.743.000	1	5.495.000	1	5.714.800	1	5.943.392	1	6.181.128	1	6.428.373	1	DPMPTSP

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	20.966.950	4	43.000.000	4	44.720.000	4	46.508.800	4	48.369.152	4	50.303.918	4	DPMPTSP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.157.000	1	20.207.000	1	21.015.280	1	21.855.891	1	22.730.127	1	23.639.332	1	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	37.893.000	11	50.280.000	11	52.291.200	11	54.382.848	11	56.558.162	11	58.820.488	11	DPMPTSP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	22.753.400	4	45.006.700	4	46.806.968	4	48.679.247	4	50.626.417	4	52.651.473	4	DPMPTSP

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	0	1	3.996.000	1	4.118.400	1	4.283.136	1	4.454.461	1	4.632.640	1	DPMPTSP
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraaan rapat dan konsultasi SKPD koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12	74.042.100	12	65.537.200	12	68.158.688	12	70.885.036	12	73.720.437	12	76.669.254	12	DPMPTSP
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	79.041.790	1	88.675.000	1	255.012.302	1	265.212.714	1	275.821.305	1	286.854.158	1	DPMPTSP
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	DPMPTSP

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	DPMPTSP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	18.666.500	1	88.675.000	1	92.222.000	1	95.910.800	1	99.747.315	1	103.737.208	1	DPMPTSP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	60.375.290	1	0	0	62.790.302	1	65.301.914	1	67.913.990	1	70.630.550	1	DPMPTSP
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Indek	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	NA	679.654.310	3,5	669.298.560	3,6	696.070.502	3,7	723.913.323	3,8	752.869.855	3,9	782.984.650	4	DPMPTSP

				Pemerintahan Daerah															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.320	1	5.849.293	1	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	318.725.210	12	322.316.360	12	335.209.014	12	348.617.375	12	362.562.070	12	377.064.553	12	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	355.929.100	12	341.982.200	12	355.661.488	12	369.887.948	12	384.683.465	12	400.070.804	12	DPMPTSP
				Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Indek	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	NA	265.414.425	4	537.766.409	4,2	378.776.201	4,4	415.328.148	4,6	429.940.514	4,8	445.138.814	5	DPMPTSP

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	124.864.425	10	215.084.809	10	223.688.201	10	232.635.729	10	241.941.159	10	251.618.805	10	DPMPTSP
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	125.000.000	1	295.181.600	1	98.988.000	1	102.948.419	1	107.066.355	1	111.349.010	1	DPMPTSP
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	15.550.000	1	27.500.000	1	28.600.000	1	29.744.000	1	30.933.000	1	32.171.000	1	DPMPTSP

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	NA	0	0	0	0	27.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	DPMPTSP
									4.219.398.311		**4.850.530.808**		**4.964.043.521**		**5.190.524.869**		**5.333.771.395**		**5.567.537.950**		

Di samping itu dalam melakukan perumusan program, juga mendasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 berikut perubahannya. Program yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada periode Tahun 2025 - 2029 **memiliki 5 (lima) Program Urusan dan 1 program Penunjang Urusan** yang merupakan program operasional perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan kewenangan dalam rangka mendukung program pembangunan daerah untuk mencapai sasaran RPJMD

Rincian program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada periode Tahun 2025-2029 dalam mendukung sasaran RPJMD meliput:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program ini diarahkan atau ditujukan untuk terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 4%.
2. Program Promosi Penanaman Modal

   Program ini diarahkan atau ditujukan untuk terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja persentase promosi di Kabupaten Batang dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 100%.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan atau ditujukan untuk meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 100%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program ini diarahkan atau ditujukan untuk terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang kondusif dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja persentase perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 100%.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Program ini diarahkan atau ditujukan untuk terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja prosentase data yang telah dicukupi dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 100%.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan atau ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dan diukur keberhasilan atau kegagalannya melalui indikator kinerja persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah dengan target kinerja pada akhir periode Renstra sebesar 98,6%.

4.2 Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dari kerangka perumusan tujuan/sasaran di atas dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 berikut perubahannya, maka rincian kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada periode Renstra 2025 -2029 dalam mendukung tercapainya program mencakup 13 (tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal didukung melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang disusun.
b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia.

2. Program Promosi Penanaman Modal

   Program Promosi Penanaman Modal didukung melalui kegiatan sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase promosi di Kabupaten Batang.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program Program Pelayanan Penanaman Modal didukung melalui kegiatan sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja prosentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung melalui kegiatan sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal didukung melalui kegiatan sebagai berikut :

   a. Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator tersedianya data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun;
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan keuangan yang disusun;
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti diklat;
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan;
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daerah;
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja jumlah cakupan layanan operasional kantor;
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara;
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja jumlah cakupan layanan operasional kantor;
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara.

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan merupakan sebuah aktivitas bagian dari suatu kegiatan utama yang lebih kecil, yang terdiri dari satu atau beberapa aktivitas untuk mencapai keluaran secara spesifik dalam kegiatan tersebut. Sub Kegiatan berfungsi untuk merinci pelaksanaan sebuah kegiatan agar lebih terarah dan efisien serta memiliki satu atau lebih jenis belanja yang mendukung pencapaian hasil kegiatan

Dari kerangka perumusan tujuan/sasaran di atas dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 berikut perubahannya, maka rincian Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada periode RENSTRA 2025 - 2029 dalam mendukung tercapainya kegiatan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan ini didukung melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan indikator kinerja jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan penanaman modal.
   b. Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia.
   Kegiatan ini didukung melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota;
   b. Sub kegiatan Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan indikator kinerja jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
b. Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
c. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator kinerja jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dIlakukan inspeksi lapangan; serta dIlakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

5. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
   b. Sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
   c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha.
6. Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.

7. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun;
   a. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan).
8. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan keuangan yang disusun;
   a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan).
   b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen).
   c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan).
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Jumlah Pegawai bersarkan tupoksi yang mengikuti Diklat;
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang).
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikaor kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket);
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket);
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket);
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket);
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket);
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen);
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan).

11. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan pengadaan barang
    a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit);
    b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit);
    c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit);
    d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit).

12. Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
    a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan);
    b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan);
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
13. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah cakupan layanan operasional kantor;
14. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara;
15. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja jumlah cakupan layanan operasional kantor;
16. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara.

Uraian lengkap mengenai program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode RENSTRA secara rinci tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE	TARGET												OPD PENANGGUNG JAWAB
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
				%	3,5		4		5		6		7		8		9	DPMPTSP
				%	3		3,5		3,6		3,7		3,8		3,9		4,0	DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			**Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang kondusif**	%	**3**	**65.937.370**	**3,5**	**262.193.000**	**3,6**	**119.600.000**	**3,7**	**124.381.000**	**3,8**	**129.322.000**	**3,9**	**134.534.100**	**4,0**	**Urusan Penanaman Modal**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya dokumen terkait pemberian fasilitasi/ insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	65.937.370	1	110.193.000	1	114.600.000	1	119.181.000	1	123.914.000	1	128.910.100	1	**Urusan Penanaman Modal**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan penanaman modal	Dokumen	NA	33.708.250	1	77.000.000	1	80.080.000	1	83.280.000	1	86.614.000	1	90.079.100	1	**Urusan Penanaman Modal**
		Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	NA	32.229.120	1	33.193.000	1	34.520.000	1	35.901.000	1	37.300.000	1	38.831.000	1	**Urusan Penanaman Modal**

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	152.000.000	0	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.000	1	
		Penyusunan peta potensi investasi Kabupaten / Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	152.000.000	0	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.000	1	**Urusan Penanaman Modal**
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			**Terlaksannya Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**Dokumen**	**100**	**72.730.425**	**100**	**150.000.000**	**100**	**231.000.000**	**100**	**237.240.000**	**100**	**243.700.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	DPMPTSP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1	72.730.425	1	150.000.000	1	231.000.000	1	237.240.000	1	243.700.000	1	250.000.000	1	**Urusan Penanaman Modal**
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	72.730.425	1	150.000.000	1	156.000.000	1	162.240.000	1	168.700.000	1	175.000.000	1	**Urusan Penanaman Modal**
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Dokumen	NA	0	0	0	0	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	**Urusan Penanaman Modal**
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			**Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal**	**%**	**NA**	**156.077.000**	**25**	**120.000.000**	**30**	**135.000.000**	**35**	**150.000.000**	**40**	**165.000.000**	**45**	**126.000.000**	**50**	DPMPTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	20	156.077.000	20	120.000.000	20	135.000.000	20	150.000.000	20	165.000.000	20	126.000.000	20	DPMPTSP
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	6	25.480.000	6	40.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	DPMPTSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	20	55.941.000	10	40.000.000	20	45.000.000	25	50.000.000	30	55.000.000	35	60.000.000	40	DPMPTSP

		Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	NA	74.656.000	12	40.000.000	15	45.000.000	17	50.000.000	20	55.000.000	23	6.000.000	25	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			**Terlaksanannya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**	**%**	**85**	**358.956.560**	**86**	**346.890.200**	**87**	**360.849.500**	**88**	**375.260.000**	**89**	**389.866.000**	**90**	**407.029.000**	**91**	DPMPTSP
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaku Usaha	55	358.956.560	60	346.890.200	65	360.849.500	70	375.260.000	75	389.866.000	80	407.029.000	85	PTSP
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	5100	270.906.800	5200	270.136.250	5300	280.941.700	5400	292.200.000	5500	303.800.000	5600	317.000.000	5700	PTSP
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2	55.316.950	3	44.246.450	4	46.100.000	5	47.900.000	6	49.500.000	7	52.000.000	8	PTSP
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	35	32.732.810	37	32.507.500	40	33.807.800	42	35.160.000	44	36.566.000	46	38.029.000	48	PTSP

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			**Terlaksannya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**%**	**100**	**67.019.560**	**100**	**63.591.651**	**100**	**66.135.000**	**100**	**68.780.000**	**100**	**71.531.000**	**100**	**74.393.000**	**100**	**PTSP**
	Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	67.019.560	20	63.591.651	23	66.135.000	25	68.780.000	27	71.531.000	30	74.393.000	35	PTSP
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	NA	67.019.560	20	63.591.651	23	66.135.000	25	68.780.000	27	71.531.000	30	74.393.000	35	DPMPTSP
			Terselenggaranya layanan publik yang berkualitas dan profesional	Skor indek (0-4)	**4,55**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	**0**	**4,56**	DPMPTSP
			Terselenggaranya layanan publik yang berkualitas dan akuntabel berbasis teknologi informatika	Skor (0-100)	76,00		76,55		76,60		76,70		76,80		76,9		77	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**98**	**3.498.677.396**	**98,1**	**3.907.855.957**	**98,2**	**4.051.459.021**	**98,3**	**4.234.863.869**	**98,4**	**4.334.352.395**	**98,5**	**4.575.581.850**	**98,6**	**DPMPTSP**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	6.511.000	5	12.011.000	5	12.491.440	5	12.991.098	5	13.510.742	5	14.051.171	5	DPMPTSP
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	6.511.000	5	12.011.000	5	12.491.440	5	12.991.098	5	13.510.742	5	14.051.171	5	DPMPTSP

	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	2.304.500.421	1	2.341.583.088	1	2.440.245.800	1	2.537.801.300	1	2.571.408.000	1	2.744.119.000	1	DPMPTSP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	2.273.384.421	19	2.310.467.088	19	2.402.885.800	19	2.499.001.300	19	2.531.000.000	19	2.702.919.000	19	DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	NA	31.116.000	2	31.116.000	2	32.360.000	2	33.600.000	2	35.000.000	2	35.500.000	2	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	1	0	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.700.000	1	DPMPTSP
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	2	0	2	25.000.000	2	26.037.440	2	27.078.938	2	28.162.095	2	29.288.579	2	DPMPTSP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	0	2	25.000.000	2	26.037.440	2	27.078.938	2	28.162.095	2	29.288.579	2	DPMPTSP
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	NA	163.555.450	1	233.521.900	1	242.825.336	1	252.538.349	1	262.639.883	1	273.145.479	1	DPMPTSP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2.743.000	1	5.495.000	1	5.714.800	1	5.943.392	1	6.181.128	1	6.428.373	1	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	20.966.950	4	43.000.000	4	44.720.000	4	46.508.800	4	48.369.152	4	50.303.918	4	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	5.157.000	1	20.207.000	1	21.015.280	1	21.855.891	1	22.730.127	1	23.639.332	1	DPMPTSP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	11	37.893.000	11	50.280.000	11	52.291.200	11	54.382.848	11	56.558.162	11	58.820.488	11	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	22.753.400	4	45.006.700	4	46.806.968	4	48.679.247	4	50.626.417	4	52.651.473	4	DPMPTSP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	0	1	3.996.000	1	4.118.400	1	4.283.136	1	4.454.461	1	4.632.640	1	DPMPTSP
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraaan rapat dan konsultasi SKPD koordinasi	Laporan	12	74.042.100	12	65.537.200	12	68.158.688	12	70.885.036	12	73.720.437	12	76.669.254	12	DPMPTSP

	PENGADAAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	79.041.790	1	88.675.000	1	255.012.302	1	265.212.714	1	275.821.305	1	286.854.158	1	DPMPTSP
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	0	0	0	0	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	DPMPTSP
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	0	0	0	0	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	DPMPTSP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	18.666.500	1	88.675.000	1	92.222.000	1	95.910.800	1	99.747.315	1	103.737.208	1	DPMPTSP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	60.375.290	1	0	0	62.790.302	1	65.301.914	1	67.913.990	1	70.630.550	1	DPMPTSP
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek	NA	679.654.310	3,5	669.298.560	3,6	696.070.502	3,7	723.913.323	3,8	752.869.855	3,9	782.984.650	4,0	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.320	1	5.849.293	1	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	318.725.210	12	322.316.360	12	335.209.014	12	348.617.375	12	362.562.070	12	377.064.553	12	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	355.929.100	12	341.982.200	12	355.661.488	12	369.887.948	12	384.683.465	12	400.070.804	12	DPMPTSP
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek	NA	265.414.425	4	537.766.409	4,2	378.776.201	4,4	415.328.148	4,6	429.940.514	4,8	445.138.814	5	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Unit	10	124.864.425	10	215.084.809	10	223.688.201	10	232.635.729	10	241.941.159	10	251.618.805	10	DPMPTSP

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	125.000.000	1	295.181.600	1	98.988.000	1	102.948.419	1	107.066.355	1	111.349.010	1	DPMPTSP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	15.550.000	1	27.500.000	1	28.600.000	1	29.744.000	1	30.933.000	1	32.171.000	1	DPMPTSP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	NA	0	0	0	0	27.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	DPMPTSP
						4.219.398.311		**4.850.530.808**		**4.964.043.521**		**5.190.524.869**		**5.333.771.395**		**5.567.537.950**		

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2030 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Batang. Target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan sosial terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Indikator Kinerja Program (IKP) Urusan Penanaman Modal
3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Penanaman Modal
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* Urusan Penanaman Modal
5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Output* Urusan Penanaman Modal

Adapun seluruh indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditampilkan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE	TARGET KINERJA TAHUN						OPD PENGAMPU/ BIDANG PENGAMPU
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN PENANAMAN MODAL (Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029)											
Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	Nilai realisasi penanaman modal adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak lainnya.	%	**Jumlah realisasi nilai investasi tahun n dikurangi Jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) : jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) x 100**	3,5	4	5	6	7	8	9	DPMPTSP
Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang		%	**Jumlah perusahaan tahun n dikurangi Jumlah perusahaan tahun (n-1) : jumlah perusahaan tahun (n-1) x 100**	3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	DPMPTSP
Indek Pelayanan Publik (IPP)	Nilai evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Penyelenggara, yang mencakup enam aspek: (1) kebijakan pelayanan, (2) profesionalisme SDM, (3) sarana dan prasarana, (4) sistem informasi pelayanan publik, (5) konsultasi dan pengaduan, dan (6) inovasi.	Skor indek (0-4)	(Σ Skor Tiap Aspek × Bobot Aspek) ÷ Skor Maksimal	**4,55**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	DPMPTSP

Nilai SAKIP	Nilai evaluasi kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.	Skor (0-100)	Mengacu pada hasil evaluasi dari Kementerian PANRB terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi (menggunakan pedoman PermenPANRB tentang evaluasi SAKIP)	76,00	76,55	76,60	76,70	76,80	76,9	77	DPMPTSP
Realisasi total terhadap target Investasi	Iklim penanaman modal yang kondusif adalah terwujudnya kepastian hukum, kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan, tersedianya informasi peluang investasi, serta dukungan infrastruktur yang mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah	%	**Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun (n-1) x 100**	**3**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**Urusan Penanaman Modal**
Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	NA	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Kab / Kota	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama pelaku usaha	NA	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia di kab / Kota	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	0	0	0	1	1	1	1	
Jumlah Dokumen / Peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen / peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen / peta digital potensi investasi yang di buat/disusun	1	0	0	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Persentase Promosi di Kabupaten Batang	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan Kabupaten Batang**	**Dokumen**	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	DPMPTSP
Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Dokumen	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Koat	Dokumen	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	1	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	NA	0	0	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
Persentase Perushaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	**Jumlah Perushaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal**	**%**	**Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dibagi Jumlah Perusahaan di kali 100**	**NA**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	DPMPTSP

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Jumlah Perusahaan yang mematuhi Pelaksanaan Penanaman Modal	20	20	20	20	20	20	20	DPMPTSP
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	Jumlah Perusahaan yang telah Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6	6	6	6	6	6	6	DPMPTSP
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20	10	20	25	30	35	40	DPMPTSP

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	NA	12	15	17	20	23	25	DPMPTSP
Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan**	**%**	**Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	DPMPTSP
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	55	60	65	70	75	80	85	PTSP
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah Ijin yang diterbitkan	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	PTSP

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah layanan konsultasi yang diterima dibagi jumlah layanan konsultasi yang diselesaikan dikali 100 %	2	3	4	5	6	7	8	PTSP
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha kurun waktu 1 tahun	Kegiatan Usaha	Jumlah Usaha yang dipantau	35	37	40	42	44	46	48	PTSP
Persentase Data yang telah dicukupi	**Jumlah Data yang telah dicukupi**	**%**	**Jumlah Prosentase data dan sistem Informasi Penanaman Modal yang telah dicukupi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**PTSP**
Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	20	23	25	27	30	35	PTSP

Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	NA	20	23	25	27	30	35	DPMPTSP
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penunjang yang terpenuhi = Jumlah layanan atau fasilitas penunjang yang telah disedikan atau dilaksanakan sesuai rencana kerja Total Kebutuhan Penunjang yang direncanakan = Jumlah total kebutuhan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah**	**%**	**Jumlah Kebutuhan Penunjang yang terpenuhi : Total Kebutuhan Penunjang yang direncanakan x 100**	**98**	**98,1**	**98,2**	**98,3**	**98,4**	**98,5**	**98,6**	**DPMPTSP**
jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5	5	5	5	5	5	5	DPMPTSP

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan (LKjIP), Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan laporan hasil kegiatan koordinasi internal/eksternal yang disusun dan didokumentasikan secara formal oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Laporan	Σ (Total dokumen Laporan Capaian Kinerja + Ikhtisar Realisasi Kinerja + Laporan Hasil Koordinasi) dalam satu tahun anggaran	5	5	5	5	5	5	5	DPMPTSP
Jumlah laporan keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	19	19	19	19	19	19	DPMPTSP
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	NA	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Orang	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	NA	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	11	11	11	11	11	DPMPTSP
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Indek	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	NA	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	DPMPTSP
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Indek	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	NA	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	DPMPTSP
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	10	10	10	10	10	DPMPTSP

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	NA	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP

4.4 Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang telah diuraikan di atas, maka yang merupakan Sub Kegiatan dalam mendukung program pembangunan Daerah Tahun 2025 -2025 untuk mencapai sasaran RPJMD adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program PrioritasPembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Sub kegiatan
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modaldaerah Kab/Kota	Sub kegiatan
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinana berusaha berbasis risiko	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Sub kegiatan
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal	Sub kegiatan
5.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Sub kegiatan

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra-PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran dengan dukungan sumber daya yang dimiliki. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance

Indikator adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tujuan dari ditetapkannya IKU bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian untuk mendapatkan informasi kinerja dan mengukur keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran guna mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 melalui upaya perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, telah disusun Indikator Tujuan dan Sasaran atau Indikator Kinerja Utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam lima tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Batang	%	4	5	6	7	8	9	Indikator Tujuan
2.	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	%	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Indikator Sasaran
3.	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Skor indek (0-5)	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	Indikator Sasaran

4.	Nilai SAKIP	Skor (0-100)	76,55	76,60	76,70	76,80	76,90	77,00	Indikator Sasaran

Dalam rangka memudahkan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada tabel di atas harus dijelaskan Definisi Operasional dari masing-masing IKU.

Definisi Operasional Indikator Kinerja adalah penjelasan rinci dan spesifik tentang suatu indikator, termasuk cara menghitung, sumber datanya, dan unit pelaksananya untuk memastikan pemahaman yang sama dan pengukuran kinerja yang obyektif.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Ayat (7) pengaturan mengenai IKK ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan sampai dengan penyusunan Renstra ini dibuat, Keputusan mengenai IKK yang terbaru tersebut belum terbit, sehingga untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sementara sambil menunggu terbitnya pengaturan IKK yang terbaru adalah menggunakan IKK yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	25	30	35	40	45	50	
5.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : DPMPTSP Kab. Batang

4.7 Isu Kesenjangan Gender

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi utama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh manfaat yang setara dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis gender serta evaluasi pelaksanaan program pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mengidentifikasi beberapa isu kesenjangan gender yang relevan dalam konteks tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

1. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan investasi masih tergolong rendah, terutama dalam skala usaha formal maupun akses terhadap fasilitas perizinan dan informasi peluang usaha.

2. Akses dan pemanfaatan layanan perizinan berbasis digital masih belum merata, terutama bagi kelompok perempuan pelaku usaha di wilayah perdesaan.
3. Minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di sektor investasi maupun sebagai pelaku usaha skala menengah dan besar.

Isu-isu ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural maupun kultural yang berdampak pada partisipasi gender dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang akan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui langkah-langkah berikut:

Tujuan Bimtek PUG untuk Pelaku Usaha

1. Memahami Konsep Gender: Peserta diajak memahami konsep dasar gender dan isu-isu kesetaraan gender yang relevan dengan dunia usaha.
2. Meningkatkan Kemampuan Berwirausaha**:** Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri pelaku usaha perempuan dan juga laki-laki dalam mengelola bisnis, serta memastikan semua orang punya kesempatan yang sama.
3. Mengintegrasikan Perspektif Gender**:** Peserta belajar cara memasukkan perspektif gender ke dalam setiap tahapan bisnis, mulai dari perencanaan ide sampai produksi

Manfaat yang Diharapkan dari adanya bimbingan teknis pelaku usaha adalah:

1. Menciptakan Bisnis Inklusif, Membangun lingkungan usaha yang adil dan memberikan kesempatan setara bagi semua individu, tanpa terkendala jenis kelamin.
2. Meningkatkan Perekonomian, Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya lebih maju dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi masyarakat dan negara.
3. Mengatasi ketidaksetaraan, berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan gender di lingkungan kerja dan masyarakat luas.

4.8 Manajemen Risiko Instansi/MRI

1. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029, penerapan

Manajemen Risiko Instansi (MRI) menjadi instrumen penting dalam memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah secara berkelanjutan.

2. Manajemen Risiko Instansi disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Melalui proses ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berupaya mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadinya hambatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan secara sistematis dan terukur.
3. **Reformasi Birokrasi**, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029, penerapan **Manajemen Risiko Instansi (MRI)** menjadi instrumen penting dalam memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah secara berkelanjutan. Manajemen Risiko Instansi disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Melalui proses ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berupaya mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadinya hambatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan secara sistematis dan terukur.

4.9 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja dalam pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian

kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Batang. Target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE	TARGET KINERJA TAHUN						OPD PENGAMPU/ BIDANG PENGAMPU
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	**INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN PENANAMAN MODAL (Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029)**											
	Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	Nilai realisasi penanaman modal adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak lainnya.	%	Jumlah realisasi nilai investasi tahun n dikurangi Jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) : jumlah realisasi nilai investasi tahun (n-1) x 100	3,5	4	5	6	7	8	9	DPMPTSP
	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang		%	Jumlah perusahaan tahun n dikurangi Jumlah perusahaan tahun (n-1) : jumlah perusahaan tahun (n-1) x 100	3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	DPMPTSP

	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Nilai evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Penyelenggara, yang mencakup enam aspek: (1) kebijakan pelayanan, (2) profesionalisme SDM, (3) sarana dan prasarana, (4) sistem informasi pelayanan publik, (5) konsultasi dan pengaduan, dan (6) inovasi.	Skor indek (0-4)	(Σ Skor Tiap Aspek × Bobot Aspek) ÷ Skor Maksimal	4,55	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	DPMPTSP
	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.	Skor (0-100)	Mengacu pada hasil evaluasi dari Kementerian PANRB terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi (menggunakan pedoman Permen PANRB tentang evaluasi SAKIP)	76,00	76,55	76,60	76,70	76,80	76,9	77	DPMPTSP
B.	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Sesuai BAB IV RPJMD 2025-2029)**											

	Realisasi total terhadap target Investasi	**Iklim penanaman modal yang kondusif adalah terwujudnya kepastian hukum, kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan, tersedianya informasi peluang investasi, serta dukungan infrastruktur yang mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah**	**%**	**Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun (n-1) x 100**	**3**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**Urusan Penanaman Modal**
	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	Urusan Penanaman Modal
	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah dalam pemberian insentif kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	NA	1	1	1	1	1	1	Urusan Penanaman Modal
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Kab / Kota	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama pelaku usaha	NA	1	1	1	1	1	1	Urusan Penanaman Modal
	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia di kab / Kota	Dokumen	Jumlah dokumen perda / perbub yang disusun	0	0	0	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen / Peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen / peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen / peta digital potensi investasi yang di buat/disusun	1	0	0	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**

	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan Kabupaten Batang**	**Dokumen**	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	DPMPTSP
	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Dokumen	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	1	1	1	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	NA	0	0	1	1	1	1	**Urusan Penanaman Modal**
	Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	**Jumlah Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal**	**%**	**Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dibagi Jumlah Perusahaan di kali 100**	**NA**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	DPMPTSP
	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Jumlah Perusahaan yang mematuhi Pelaksanaan Penanaman Modal	20	20	20	20	20	20	20	DPMPTSP
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	Jumlah Perusahaan yang telah Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6	6	6	6	6	6	6	DPMPTSP

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20	10	20	25	30	35	40	DPMPTSP
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	NA	12	15	17	20	23	25	DPMPTSP
	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan**	**%**	**Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	DPMPTSP
	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	55	60	65	70	75	80	85	PTSP

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah Ijin yang diterbitkan	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	PTSP
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah layanan konsultasi yang diterima dibagi jumlah layanan konsultasi yang diselesaikan dikali 100 %	2	3	4	5	6	7	8	PTSP
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha kurun waktu 1 tahun	Kegiatan Usaha	Jumlah Usaha yang dipantau	35	37	40	42	44	46	48	PTSP
	Persentase Data yang telah dicukupi	**Jumlah Data yang telah dicukupi**	**%**	**Jumlah Prosentase data dan sistem Informasi Penanaman Modal yang telah dicukupi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**PTSP**

	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	20	23	25	27	30	35	PTSP
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	NA	20	23	25	27	30	35	DPMPTSP
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penunjang yang terpenuhi = Jumlah layanan atau fasilitas penunjang yang telah disedikan atau dilaksanakan sesuai rencana kerja Total Kebutuhan Penunjang yang direncanakan = Jumlah total kebutuhan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah**	**%**	**Jumlah Kebutuhan Penunjang yang terpenuhi : Total Kebutuhan Penunjang yang direncanakan x 100**	**98**	**98,1**	**98,2**	**98,3**	**98,4**	**98,5**	**98,6**	**DPMPTSP**

	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5	5	5	5	5	5	5	DPMPTSP
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan (LKjIP), Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan laporan hasil kegiatan koordinasi internal/eksternal yang disusun dan didokumentasikan secara formal oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Laporan	Σ (Total dokumen Laporan Capaian Kinerja + Ikhtisar Realisasi Kinerja + Laporan Hasil Koordinasi) dalam satu tahun anggaran	5	5	5	5	5	5	5	DPMPTSP
	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	19	19	19	19	19	19	DPMPTSP
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	NA	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Orang	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	NA	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	11	11	11	11	11	DPMPTSP
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Indek	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	NA	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	DPMPTSP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP
	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Indek	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	NA	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	DPMPTSP
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	10	10	10	10	10	10	DPMPTSP
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	NA	0	0	1	1	1	1	DPMPTSP

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sekaligus sebagai pedoman kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang disusun melalui proses analisis yang sistematis, dimulai dari evaluasi capaian periode sebelumnya, analisis isu strategis, hingga perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merefleksikan komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara substansi, terdapat beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan dari keseluruhan isi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Kabupaten Batang 2025–2029, yaitu:

1. Keterpaduan dengan dokumen perencanaan daerah.

   Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari misi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan penguatan iklim investasi, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seluruh tujuan dan sasaran yang tertuang di dalamnya berkontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Batang.

2. Penegasan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

   Visi dan misi perangkat daerah dirumuskan selaras dengan arah pembangunan daerah dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran yang berorientasi pada peningkatan realisasi investasi, perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penguatan tata kelola penanaman modal.

3. Peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

   Dengan memperkuat perizinan dan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berperan langsung dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

Ke depan, implementasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi dengan perangkat daerah lain, kerja sama dengan dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan program menjadi hal yang tidak kalah penting.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berkomitmen untuk menjadikan dokumen ini sebagai pedoman kerja yang konsisten, terarah, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dokumen ini sekaligus menjadi wujud akuntabilitas perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kinerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kabupaten Batang sebagai daerah yang ramah investasi, berdaya saing, dan sejahtera. Dengan komitmen yang kuat, sinergi yang solid, serta semangat kerja yang berorientasi pada hasil, maka tujuan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 perlu dikendalikan dan dievaluasi secara berkala agar tetap konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah maupun perkembangan regulasi di bidang penanaman modal.

5.2.1 Pengendalian

Pengendalian Renstra dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan supervisi secara rutin, baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana teknis. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Bentuk pengendalian meliputi:

1. Monitoring internal oleh masing-masing kelompok kerja dan sekretariat, dilaksanakan secara triwulanan untuk mengukur progres realisasi program dan kegiatan.
2. Rapat evaluasi kinerja internal yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP, dengan agenda pembahasan capaian indikator kinerja, kendala, serta langkah perbaikan.
3. Pelaporan kinerja bulanan dan triwulanan sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Bapperida.
4. Pengendalian berbasis sistem melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) untuk memantau ketercapaian target indikator dan realisasi anggaran.

5.2.2 Evaluasi

Evaluasi Renstra dilaksanakan secara periodik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kinerja, yakni membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja. Bentuk evaluasi meliputi:

1. Evaluasi Tahunan, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun setiap akhir tahun dan menjadi bahan penilaian akuntabilitas kinerja (SAKIP).
2. Evaluasi Renja dilakukan tiap triwulan untuk mengetahui capaian kinerja anggaran dan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Evaluasi Eksternal, dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Bapperida, serta Kementerian/Lembaga terkait (misalnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM), untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Renstra dengan kebijakan nasional dan daerah. Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan kelompok kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang agar mendukung

pencapaian target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Seluruh aparatur di Sekretariat dan kelompok kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 yang telah disusun untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan penanaman modal Kabupaten Batang.